BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kumpulan peraturan dibuat untuk mengatur masyarakat dalam bertingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Hukum memiliki sifat memaksa yang maksudnya agar hukum dapat ditaati oleh masyarakat. Untuk mewujudkan terciptanya ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka aturan hukum berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Indonesia berpegang teguh kepada hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku dan bukan berdasar kepada kekuasaan (*machtsstaat*) saja. Hukum yang ada di Indonesia terdiri dari hukum adat, hukum Islam, hukum Barat yang menganut berdasarkan sistem hukum *civil law* dan juga *common law*.

“Hukum adat berasal dari kebiasaan adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat di Indonesia berbeda halnya dengan hukum Islam dimana perkembangan hukum ini sesuai dengan banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam. Sistem *civil law* diterapkan di Indonesia karena Belanda pernah menjajah bangsa Indonesia sedangkan *common law* diterapkan di Indonesia melalui keanggotaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional, (Teguh Prasetyo, 2014) “.

Penerapan pluralisme hukum di Indonesia, dikarenakan keempat hukum berjalan di Indonesia. Hal yang dinyatakan oleh Ilham Basri bahwa sistem hukum

Indonesia yang rumit dan luas memiliki beberapa unsur hukum yang berkaitan antara satu dan lainnya, (Teguh Prasetyo, 2014 : 4).

Luasnya Wilayah Indonesia dari sabang sampai marauke dapat dilihat dari perbedaan karakteristik Indonesia yang memiliki lima pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Selain itu, wilayah Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil sehingga pemerintah di Indonesia harus berusaha memenuhi sarana transportasi sebagai penghubung untuk dapat menjangkau pulau-pulau tersebut. Transportasi merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Ketersediaan transportasi bukan hanya untuk menghubungkan wilayah saja namun transportasi juga mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan maupun masyarakat dalam pembangunan ekonomi yaitu dalam mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi dan sosial politik suatu negara. Transportasi yang dimanfaatkan secara efektif dan efisien dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pemerataan pembangunan di Indonesia. Setiap tahunnya Jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan,. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut dikarenakan merupakan kebutuhan penduduk dan sebagai solusi untuk memenuhi mobilitasnya (Reswa, 2016 : 1).

Transportasi merupakan suatu sarana yang berguna dalam mengurangi waktu tempuh ke tempat tujuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan transportasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia terutama dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Transportasi terdiri dari beberapa jenis yaitu transportasi darat, laut, bahkan udara. Beberapa jenis transportasi tersebut seperti transportasi darat memiliki potensi kecelakaan relatif lebih tinggi dari pada

transportasi laut dan udara. Untuk meminimalisir hal tersebut maka dibentuklah aturan mengenai uji berkala.

Uji berkala kendaraan bermotor di dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan uji kir (Hendry S.Siswosoediro, 2009 : 27). Uji berkala kendaraan merupakan suatu bentuk pengawasan pemerintah dalam upaya menjamin kelayakan kendaraan yang ada di jalan agar memenuhi syarat teknis dan laik jalan. Kementerian perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan salah satunya adalah pengawasan terhadap uji berkala. Uji berkala dilaksanakan oleh pemerintah, pemegang merek dan oleh swasta. Keterlibatan swasta dalam kegiatan uji berkala, kementerian perhubungan bersama pemerintah daerah akan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uji berkala.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan Salah satu obyek retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi maupun badan merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam jenis-jenis retribusi jasa umum pelayanan pengujian kendaraan bermotor diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Permadhi, 2017 :280).

Ketentuan mengenai uji berkala kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian lebih mendalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Pasal

53 ayat (1) yaitu uji berkala wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Kemudian, di ayat (2) disebutkan bahwa pengujian berkala meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor serta pengesahan hasil uji. Selain pada Pasal 53, pengaturan mengenai uji berkala lebih lanjut diperjelas pada Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutana Jalan.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kemudian yang dimaksud dengan uji berkala yaitu pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Tujuan dilaksanakannya uji berkala kendaraan bermotor adalah untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor juga mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan yang berkemungkinan diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan. Selain itu uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakann dengan tujuan untuk memberikan pelayanana umum kepada masyarakat.

Kenyataannya yang ditemui masih banyaknya kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji berkala terutama kendaraan mobil bus atau yang disebut

bimbar oleh masyarakat khususnya di wilayah Kota Batam. Hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan kendaraan tersebut tidak laik jalan dan kemudian diperparah dengan supir yang mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan di jalan . Padahal kendaraan umum seharusnya memenuhi standar kendaraan angkutan. Kendaraan yang tidak laik jalan ini dapat menimbulkan banyaknya kecelakaan di jalan raya karena kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan namun masih beroperasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat menjadi korban akibat masih beroperasinya kendaraan tersebut.

Hal yang harus dilakukan agar dapat menjamin keselamatan masyarakat sebagai penumpang maka diperlukan pengujian secara berkala terhadap kendaraan tersebut. Uji Berkala pada kendaraan bertujuan untuk menertibkan kondisi kendaraan sebagaimana layaknya, namun aparat yang melaksanakan dengan sistem yang dipergunakan serta peralatan pendukungnya merupakan faktor keberhasilan program ini. Pengujian kendaraan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas udara di luar ruangan terutama di jalan raya serta permukiman yang berada pada lintasan angin yang berasal dari jalan raya. Selain itu, pengujian kendaraan juga dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan penumpang dan pelayanan umum. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor maka diharapkan Dinas Perhubungan dapat lebih tegas menertibkan bimbar tidak laik jalan yang masih beroperasi demi keselamatan jiwa pengguna jalan. Pemerintah sebagai regulator memiliki peranan yang sangat diperlukan dalam mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan transportasi publik. Kegiatan operasional transportasi yang

dilakukan pemerintah yaitu menentukan trayek/rute transportasi, menetapkan tarif angkutan, melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor, melakukan kir kondisi fisik/teknis kendaraan bermotor, pengawasan kelayakan/kelaikan kendaraan bermotor, dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan transportasi.

Selain bentuk fisik kendaraan yang memprihatinkan, mesin kendaraan juga sering mengalami kerusakan. Keberadaan kendaraan dengan fisik yang memprihatinkan di jalan raya dapat merusak pemandangan di jalan raya. Tidak hanya itu kendaraan ini juga sebagai salah satu penyumbang kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Hal lain yang sering dilakukan pengemudi antara lain seperti menerobos lampu merah, dan berhenti tidak sesuai dengan rambu lalu lintas. Penyelenggaraan transportasi perkotaan yang efektif dan efisien yaitu melayani angkutan penumpang dan barang secara lancar (cepat), selamat (aman), berkapasitas dan berfrekuensi, tertib dan teratur, murah (terjangkau), nyaman, dan tersedia keseluruh bagian kota.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka telah terlupakan oleh masyarakat bahwa seharusnya pemanfaatan kendaraan oleh masyarakat harus mengingat bahwa ada aspek-aspek hukum. Salah satu aspek hukum yang harus dijalankan oleh masyarakat adalah dengan mengurus pengujian kendaraan bermotor melalui dinas yang telah disediakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk

mengujikan kendaraannya maka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak akan dapat berjalan secara maksimal (Chantika, 2013 : 11).

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara keilmuan dalam sebuah skripsi, dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Masih adanya kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji berkala sehingga menyebabkan kendaraan tersebut tidak laik jalan.
2. Uji berkala merupakan syarat laik jalan sebagai kendaraan bermotor yang salah satunya mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan atau dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
2. Penelitian ini difokuskan pada kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam berkaitan dengan masalah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini dalam bidang hukum perdata dapat memberikan kontribusi terutama terkait dengan pengujian berkala kendaraan bermotor.

- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang membahas tentang pengujian berkala kendaraan bermotor.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan pada pemerintah agar dapat membuat kebijakan-kebijakan baru untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor mengingat karena masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan namun masih beroperasi.

- 2) Bagi Dinas Perhubungan

Penelitian ini bertujuan agar Dinas Perhubungan dapat lebih tegas menertibkan kendaraan yang tidak laik jalan namun masih beroperasi.

- 3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya pengujian berkala kendaraan bermotor bagi keselamatan dalam berkendara.